

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Representasi aktor sosial merupakan penggambaran aktor sosial dalam suatu pemberitaan di media massa. Menurut Leeuwen (2008, hlm. 23) penggambaran aktor sosial dapat terlihat dari bagaimana penggunaan bahasa dalam media massa tersebut. Dalam media massa, penggunaan bahasanya cenderung memiliki makna tertentu (Leeuwen, 2008, hlm. 23). Leeuwen (2008, hlm. 24) mengatakan bahwa makna biasanya muncul secara sengaja, karena adanya tujuan dari kelompok tertentu. Maknanya dapat tergambarkan dengan jelas berdasarkan eksklusi dan inklusi dalam teks berita. (Leeuwen, 2008, hlm. 28). Jenis dari inklusi dan eksklusi dapat terlihat dari bagaimana aktor dalam sebuah teks berita disembunyikan atau diperlihatkan secara jelas.

Representasi aktor sosial merupakan hal yang penting untuk dikaji, karena melalui representasi aktor sosial dapat terlihat bagaimana cara media massa mengemas sebuah teks berita. Selain itu, dapat terlihat sejauh mana netralitas dari sebuah media massa. Beberapa hal tersebut dapat berujung pada bagaimana media massa mengubah ideologi masyarakat terhadap suatu pemberitaan. Terutama pada isu-isu yang sangat sensitif seperti politik.

Kajian mengenai representasi aktor sosial dalam sebuah teks berita yang tercermin dalam penggunaan inklusi dan eksklusi sudah banyak dipublikasikan. Hal tersebut dapat terlihat dari skripsi Rohmawati (2016) mengenai strategi inklusi dan eksklusi dalam wacana pemberitaan kriminal khususnya pada kasus kejahatan seksual pada harian Jawa Pos. Selanjutnya, terdapat dalam skripsi Umayyah (2017) mengenai penggambaran keislaman tokoh Soekarno dalam Majalah *Intisari*. Beberapa jurnal juga sudah banyak dipublikasikan. Salah satunya jurnal Rilma, dkk (2019) yang menganalisis bagaimana kecenderungan sikap dari media daring *sindonews.com*, *vivanews.com*, *detiknews.com*, *kompas.com*, dan *metrotvnews.com* dalam menanggapi

kasus tercecernya KTP elektronik. Berdasarkan perkembangan penelitian mengenai representasi aktor sosial dalam teks berita dapat disimpulkan bahwa benar adanya

Salsabila, 2020

*REPRESENTASI AKTOR SOSIAL DALAM PEMBERITAAN AKSI MAHASISWA 24 SEPTEMBER 2019  
DI MEDIA CNNINDONESIA.COM*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

representasi aktor sosial tertentu ada dalam sebuah media massa. Selain itu, memiliki kecenderungan mengubah ideologi masyarakat.

Penelitian ini merupakan pembaharuan, karena memiliki objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya. objek yang diambil merupakan kasus aksi mahasiswa mengenai penolakan pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di mana pemberitaan tersebut masih hangat dibicarakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Pemberitaan mengenai aksi mahasiswa mengenai penolakan pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak hanya menjadi bahan pemberitaan di Indonesia, tetapi sudah sampai media internasional. Seperti beirta yang dilansir oleh Mashable SE Asia (2019) dengan judul *Here's The Rundown on What's Really Going On With The Protest in Indonesia*. pemberitaan tersebut menjelaskan apa saja aspek yang akan diprotes oleh mahasiswa di gedung DPR/MPR dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Selain itu, terdapat beberapa cuplikan video yang menunjukkan masifnya penolakan kebijakan tersebut hingga media sosial. Selanjutnya, The New York Times (2019) juga memberitakan hal yang berkenaan dengan aksi mahasiswa di gedung DPR/MPR dengan judul *Thousands in Indonesia Protest Bills to Limit Rights and Ban Extramarital Sex*. Pemberitaan tersebut berisi mengenai penjelasan mayoritas dari mahasiswa mengapa mengadakan aksi tersebut dan menuntut adanya pembatalan RKUHP bukan menunda untuk disahkan. Selain itu, tuntutan juga diadakan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara Indonesia dalam berbagai kasus yang terjadi di Indonesia.

Politik dan aksi sudah tentu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, karena aspirasi masyarakat secara umum dapat tersampaikan. Aksi juga merupakan

jalan untuk menyampaikan kritik pada pemerintah apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Aksi pada hari Selasa, 24 September 2019 merupakan hari yang bersejarah bagi Indonesia, karena pada hari itu gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi saksi bisu bagi pengulangan tragedi 1998. Tragedi 1998 merupakan peristiwa penurunan secara “paksa” Soeharto oleh aliansi mahasiswa di Indonesia. Sedangkan aksi yang terjadi pada 24 September 2019 bertujuan untuk menyampaikan tujuh tuntutan mahasiswa. Berdasarkan pemberitaan *news.detik.com* (26/09) Tujuh tuntutan tersebut di antaranya, penolakan terhadap revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), isu lingkungan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), dan kriminalisasi aktivis.

Aksi dilakukan hingga dini hari. Hal tersebut menyebabkan banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab menyelinap dan membuat kerusuhan. Dengan demikian, banyak mahasiswa dan polisi yang menjadi korban atas terjadinya peristiwa tersebut. Ratusan korban banyak mengalami luka-luka. Selain itu, terdapat pula korban yang meninggal dunia disebabkan kelelahan dan terinjak ketika aksi berlangsung. Berdasarkan pemberitaan *kompas.com* (2019) yang berjudul “Demo UU KPK dan RKUHP, 232 Orang Jadi Korban, 3 Dikabarkan Kritis” dapat diketahui bahwa total korban mencapai 232 orang, tiga di antaranya dalam kondisi kritis, dan dua korban meninggal dunia. Apabila korban dibagi berdasarkan regional, terdapat 37 mahasiswa dan tiga wartawan di Sulawesi Selatan yang terluka, tiga orang mahasiswa di Sumatera Selatan dalam kondisi kritis, 92 orang mahasiswa dan sembilan orang polisi di Bandung terluka, 88 orang di Senayan terluka, dan dua orang mahasiswa yang berasal dari Kendari meninggal dunia.

Media memiliki berbagai macam cara untuk menyampaikan pola pikir yang akan berpengaruh bagi pembacanya. Salah satunya dengan menggunakan strategi eksklusif dan inklusi dalam teks beritanya. Strategi eksklusif dapat digambarkan dengan cara menyembunyikan kesalahan dari pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam sebuah

Salsabila, 2020

**REPRESENTASI AKTOR SOSIAL DALAM PEMBERITAAN AKSI MAHASISWA 24 SEPTEMBER 2019  
DI MEDIA CNNINDONESIA.COM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemberitaan, sedangkan strategi inklusi dapat digambarkan dengan cara menampilkan kesalahan dari pihak yang dimarjinalkan dalam sebuah pemberitaan. Biasanya, media cenderung menampilkan kesalahan pihak yang dimarjinalkan secara berlebihan. Padahal, bisa saja kesalahan terdapat pada ke dua belah pihak. Dengan demikian, penggunaan strategi tersebut dapat menimbulkan efek bagi pembaca bahwa kesalahan terbesar terletak pada pihak yang dimarjinalkan.

Penelitian ini akan membahas mengenai representasi aktor sosial dalam teks berita yang dipublikasikan oleh media *cnnindonesia.com*. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi peneliti mengambil pemberitaan kasus aksi mahasiswa mengenai penolakan pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Alasan pertama peristiwa ini salah satu peristiwa penting yang melibatkan aliansi mahasiswa seluruh Indonesia untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai pengulangan kembali tragedi 1998 dengan tujuan yang berbeda. Kedua masih banyak ditemukan keberpihakkan media dalam memberitakan kasus yang berkaitan dengan pemerintahan. Adanya ketidaknetralan dari suatu media dapat berpengaruh terhadap tanggapan masyarakat dalam suatu kasus yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini ditemukan adanya pernyataan berlebihan, seperti pada pernyataan yang dilansir oleh media *cnnindonesia.com* (2019) “atas aksi itu, polisi kemudian mulai mengambil tindakan tegas. Menurut Gatot, langkah itu diambil lantaran aksi yang dilakukan sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan anarkis”. Penggunaan kata “anarkis” dinilai terlalu berlebihan, karena pada saat itu aksi masih berjalan dengan lancar. Selain itu, keberpihakkan dari media juga menjadi penyebab perubahan paradigma masyarakat terhadap suatu kasus pemberitaan. Masyarakat hanya akan melihat suatu pemberitaan dari satu sisi tanpa melihat sisi lainnya. Padahal, kenetralan media dapat menjadi sarana edukasi agar terciptanya masyarakat yang cerdas dalam menanggapi berbagai kasus yang terjadi.

Selanjutnya, peneliti akan mengambil pemberitaan dari media *cnnindonesia.com* yang berjudul “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi”. Pemilihan media tersebut atas dasar pertimbangan bahwa media *cnnindonesia.com* termasuk dalam CNN International. Di mana pemberitaan yang dipublikasikan diharapkan sudah memenuhi kategori netral. Sesuai dengan pasal satu Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa “wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Pada poin berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Hal tersebut bermaksud tidak bolehnya ada keberpihakan dari suatu media terhadap pemberitaan kasus apapun. Dalam kasus tersebut, dapat terlihat bahwa media *cnnindonesia.com* memiliki keberpihakan kepada pihak kepolisian. Padahal korban yang berjatuhannya justru banyak yang berasal dari mahasiswa, bukan kepolisian.

teks berita mengenai pemberitaan aksi mahasiswa 24 September 2019 di media *cnnindonesia.com* dipublikasikan pada Rabu, 25 September 2019. Pemilihan teks berita berdasarkan tanggal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa diharapkan pemberitaan “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” yang membahas penolakan pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dipaparkan, teori Analisis Wacana Kritis Leeuwen dinilai dapat menjawab representasi aktor sosial dalam kasus aksi mahasiswa mengenai penolakan pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini dapat ditinjau secara mendalam melalui analisis jenis inklusi dan eksklusi dalam pemberitaan mengenai aksi tersebut.

## **B. Masalah Penelitian**

Dalam bagian ini akan dijelaskan masalah utama yang menjadi fokus penelitian. Penjelasan tersebut meliputi (1) identifikasi masalah, (2) pembatasan masalah, dan (3) perumusan masalah.

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dari penelitian ini diuraikan seperti di bawah ini.

- (1) Adanya representasi aktor sosial tertentu yang dapat diketahui berdasarkan penggunaan inklusi dan eksklusi dalam teks berita.
- (2) teks berita di media *cnnindonesia.com* mengandung maksud tersembunyi. Dengan demikian, diperlukan analisis secara mendalam mengenai teks berita tersebut.

### **2. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, penelitian ini akan dibatasi pada hal-hal berikut ini.

- (1) Data penelitian yang digunakan berupa teks berita yang berjudul “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh, Versi Polisi”
- (2) Sumber data yang akan diteliti berdasarkan teks berita yang berjudul “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh, Versi Polisi” dipublikasikan oleh media *cnnindonesia.com* pada Rabu, 25 Desember 2019
- (3) Tuturan inklusi dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” di media *cnnindonesia.com*.
- (4) Tuturan eksklusi dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” di media *cnnindonesia.com*.
- (5) Representasi aktor sosial dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” di media *cnnindonesia.com*.

### 3. Perumusan Masalah

Penelitian ini memiliki masalah pokok yaitu mengungkapkan representasi aktor sosial dalam media *cnnindonesia.com* dalam pemberitaan aksi mahasiswa mengenai penolakan pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Masalah pokok tersebut akan diuraikan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut.

- (1) Bagaimana jenis tuturan inklusi dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” di media *cnnindonesia.com*?
- (2) Bagaimana jenis tuturan eksklusif dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” di media *cnnindonesia.com*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.

- (1) Jenis tuturan inklusi dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” di media *cnnindonesia.com*.
- (2) Jenis tuturan eksklusif dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” di media *cnnindonesia.com*.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi secara teoretis maupun praktis. Berikut deskripsi dari manfaat-manfaat tersebut.

Manfaat teoretis:

- (1) Referensi dan sumbangsih bagi perkembangan kajian Analisis Wacana Kritis (AWK).
- (2) Gambaran representasi aktor sosial di media *cnnindonesia.com* terhadap pemberitaan aksi mahasiswa mengenai penolakan pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang

Salsabila, 2020

**REPRESENTASI AKTOR SOSIAL DALAM PEMBERITAAN AKSI MAHASISWA 24 SEPTEMBER 2019  
DI MEDIA CNNINDONESIA.COM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Manfaat praktis:

- (1) Menambah wawasan bagi peneliti, khalayak umum, dan peneliti lain apabila membahas mengenai representasi aktor sosial dalam media massa.
- (2) Menambah wawasan mengenai proses produksi sebuah berita bagi masyarakat.
- (3) Upaya untuk menyadarkan masyarakat terhadap tidak netralnya berita yang disebarluaskan oleh media massa. Dengan demikian, masyarakat dituntut untuk lebih selektif dalam pemilihan suatu berita.

## **E. Struktur Organisasi Skripsi**

### **BAB I**

Bab ini merupakan pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi.

### **BAB II**

Dalam bab ini berisi mengenai kajian pustaka yang terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka teori. Tinjauan pustaka menjelaskan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Sedangkan kerangka teori menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini dari segi teori yang digunakan. Teori yang digunakan mengenai Analisis Wacana Kritis (AWK) Leeuwen yang membahas mengenai inklusi, eksklusi, dan representasi aktor sosial dalam sebuah wacana. Selain itu, terdapat pula penjelasan mengenai teori berpikir kritis.

### **BAB III**

Salsabila, 2020

*REPRESENTASI AKTOR SOSIAL DALAM PEMBERITAAN AKSI MAHASISWA 24 SEPTEMBER 2019  
DI MEDIA CNNINDONESIA.COM*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya desain penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, analisis data, dan definisi operasional.

#### **BAB IV**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil analisis secara mendalam mengenai representasi aktor sosial dari teks berita pada laman *cnnindonesia.com* khususnya “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” melalui penggunaan kalimat maupun frasa yang termasuk jenis inklusi dan eksklusi.

#### **BAB V**

Bab terakhir ini berisi kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi dari peneliti. Peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai jenis representasi aktor sosial pada teks berita di media *cnnindonesia.com* yang secara khusus membahas aksi mahasiswa 24 September 2019 berdasarkan penggunaan kalimat inklusi dan eksklusi. Kemudian, hasil dari penelitian tersebut akan ditindaklanjuti dengan memberikan implikasi serta rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.